

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. & Gash, A. (2008). Collaborative Governance In Theory And Practice. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 18(4), 543–571.
- Ansell, Christopher, (2014), *Pragmatist Democracy: Evolutionary Learning As Public Philosophy*, New York: Oxford University Press, Inc.
- Astuti, R., Warsono, H. Dan Rachim, Abd. (2020). *Collaborative Governance Dalam Persepektif Administrasi Publik*. Tim DAP Press. Semarang. 164 Hlm.
- Billa, A. Dan Saputra, B. (2019). “Strategi Collaborative Governance Dalam Pemerintahan. *Jurnal Transformasi Administrasi*.
- Cahyono, A. S., Dewi, R. S., Zauhar, S., Domai, T., & Siswidiyanto, S. (2023). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(3), 340-357.
- Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Provinsi Lampung*. (2023). Lampung.
- Choi, T., & Robertson, P. J. (2013). Deliberation And Decision In Collaborative Governance: A Simulation Of Approaches To Mitigate Power Imbalance. *Journal Of Public Administrationresearch And Theory*, 24, 495-518.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Evaluating The Productivity Of Collaborative Governance Regimes: A Performance Matrix. *Public Performance And Management Review*, 38(4), 717–747. <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016>
- Holzer, Marc, Et Al. (2012). An Analysis Of Collaborative Governance Models The Context Of Shared Services. Dalam Lauer Schachter, Hindy Kaifeng, Yang (Ed). *The State Of Citizen*
- Lahagu, F. M. (2019). *Kota Medan Sebagai Kota Layak Anak Implementasi Pasal 34 Uud 1945 Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022*. Medan.
- Mukhtazar, M. P. (2012). *Teknik Penyusunan Skripsi*. Absolute Media.
- Patilima, H. (2017). Kabupaten Kota Layak Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 13, No 1
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Depok. Publik (*Jurnal Ilmu Administrasi*), 8(1), 38-52.

- Ratner, B. D. (2012). Collaborative Governance Assessment. CGIAR Research. Program On Aquatic Agricultural Systems And The CGIAR Research Program On Policies
- Sinergitas Pemerintah, Swasta Dan Civil Society Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Yogyakarta . (20).
- Sinergitas Pemerintah, Swasta Dan Civil Society Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Yogyakarta.* (2020). Yogyakarta.
- Subarsono, AG. 2011. Analisis Kebijakan Publik Konsep, 15Teori, Dan Aplikasi.Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT. Alfabet
- Sumanda, R. (2024). *Strategi Komunikasi Pemerintah Aceh Dalam Upaya Pengembangan Kota Layak Anak Provinsi Aceh (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh)* (Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah Dan Komunikasi).

Dasar Hukum:

- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak